

Dominasi Kekuasaan dalam Jaringan Kebijakan: Studi Kasus POLRI Super App dengan Pendekatan Policy-Network Theory

Vica Alifia Putri Ismunandar

ABSTRAK

Di tengah gelombang transformasi digital sektor publik, POLRI Super App hadir sebagai simbol modernisasi pelayanan kepolisian. Namun, di balik citra inovatif tersebut, tersembunyi dinamika kekuasaan dan pola hubungan antar-aktor yang memengaruhi arah kebijakan digital di tubuh Polri. Penelitian ini membahas distribusi kekuasaan dalam jaringan kebijakan pengembangan POLRI Super App menggunakan pendekatan *Policy Network Theory* dari David Knoke, dengan menyoroti dua elemen utama: *power structure* dan *interlocking directorates*. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan POLRI Super App didominasi oleh Kapolri dan Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (DivTIK) Polri, yang memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan, pengelolaan data, serta pengembangan fitur. Struktur kekuasaan yang sangat terpusat menyebabkan aktor-aktor lain, baik internal maupun eksternal, memiliki ruang partisipasi yang terbatas. Temuan juga mengungkap terbentuknya pola *interlocking* yang melibatkan mitra seperti tenaga ahli dari perguruan tinggi dan perusahaan swasta, namun relasi yang terbentuk masih bersifat subordinatif, bukan kolaboratif. Dominasi aktor utama menyebabkan minimnya respons terhadap masukan dari aktor lain, termasuk dari unit kewilayahan dan masyarakat. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam penguatan literatur *Policy Network Theory* dengan menunjukkan bahwa dalam konteks e-government, struktur kekuasaan dan pola interaksi yang timpang dapat menghambat efektivitas tata kelola digital. Dalam dimensi G2G, dominasi satu aktor menghambat koordinasi lintas instansi; dalam G2B, relasi dengan sektor swasta bersifat transaksional dan kurang inovatif; sedangkan dalam G2C, minimnya ruang partisipasi masyarakat melemahkan responsivitas layanan publik digital. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital membutuhkan pola hubungan yang lebih kolaboratif dan seimbang antar aktor dalam jaringan kebijakan.

Kata Kunci: Policy-Network Theory, POLRI Super App, Kebijakan Digital

Power Dominance in Policy Networks: Case Study of POLRI Super App with Policy-Network Theory Approach

Vica Alifia Putri Ismunandar

ABSTRACT

Amid the wave of digital transformation in the public sector, the POLRI Super App emerges as a symbol of modernization in police services. However, behind this image of innovation lies a power dynamic and pattern of actor relationships that shape the direction of digital policy within the Indonesian National Police (POLRI). This study explores the distribution of power in the policy network surrounding the development of the POLRI Super App, using David Knoke's Policy Network Theory, focusing on two core elements: power structure and interlocking directorates. Employing a qualitative descriptive method, data were collected through document analysis, interviews, and indirect observation. The findings reveal that the development of the POLRI Super App is dominated by the Chief of Police and the Division of Information and Communication Technology (DivTIK), who hold central roles in decision-making, data governance, and feature development. This centralized power structure limits the participation of other actors—both internal and external. The research also identifies interlocking patterns involving partners such as academic experts and private companies; however, these relationships tend to be subordinative rather than genuinely collaborative. The dominance of key actors results in a lack of responsiveness to input from regional units and the public. Theoretically, this study contributes to the enrichment of Policy Network Theory by demonstrating that in the context of e-government, imbalanced power structures and unequal actor interactions can hinder effective digital governance. In the G2G dimension, dominant control restricts cross-agency coordination; in G2B, the relationship with the private sector is transactional rather than innovative; and in G2C, limited public participation weakens the responsiveness of digital public services. Therefore, successful digital transformation requires more balanced and collaborative relationships among actors within the policy network.

Keywords: Policy-Network Theory, POLRI Super App, Digital Policy